



### Khawatirkan Efek Domino Kenaikan Pertamina

#### Warga Cemas Berdampak pada Ongkos Distribusi dan Harga Bahan Pokok

**JOGJA** - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai kemarin (10/6) memicu kekhawatiran warga. Selain menambah beban pengeluaran, masyarakat khawatir kenaikan harga bahan bakar tersebut akan berdampak berantai pada naiknya harga kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Salah satu warga, Purwanto menilai kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi di situasi saat ini sangat tidak tepat. Lantaran masyarakat kini tengah menghadapi kesulitan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di samping itu, kebijakan menaikkan Pertamina juga dikhawatirkan dapat menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Sebab efeknya nanti akan berantai pada semakin tingginya harga kebutuhan pokok.

"Sekarang memang belum terasa dampaknya, tapi besok-besok akan lain karena Pertamina ini," kata warga Kemantren Wirobrajan ini kemarin (10/6).

Warga Sleman, Atmaja menambakan, kaget ketika mendapatkan berita tentang kenaikan harga Pertamina. Lantaran kebijakan itu muncul secara tiba-tiba. "Selama ini memang pakai Pertamina, kalau Pertamina kendala utamanya itu antrean sering panjang banget," ujar Atmaja.

Menurutnya, kenaikan harga

Pertamax akan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Karena Pertamina sudah menjadi bahan bakar utama untuk kendaraannya. Dia pun masih pikir-pikir untuk beralih ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menyatakan sudah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi gejolak ekonomi

dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Salah satunya melalui program operasi pasar.

Wawan yakin, operasi pasar dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Selain fokus pada kebutuhan pokok masyarakat, Pemkot juga akan

berkoordinasi dengan perbankan agar memberikan kebijakan keringanan. Seperti pengurangan suku bunga kredit bagi pelaku usaha mikro hingga menengah guna membantu keberlangsungan usaha mereka.

"Jangan sampai masyarakat mengeh baru kita berbuat. Kita segera mitigasi dan action untuk menanganinya itu," tegas Wawan. (mu/wia/rg)

### Alokasi Anggaran BBM Kendaraan Dinas Berpotensi Direvisi

**PEMKOT** Jogja berpotensi merevisi alokasi anggaran BBM untuk kendaraan dinas, menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina kemarin (10/6). Sekaligus mendorong agar aparat sipil negara (ASN) untuk lebih hemat.

Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, langkah antisipasi menghadapi lonjakan harga minyak sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan jauh sebelum kenaikan harga Pertamina. Misalnya dengan mengurangi jumlah perjalanan dinas (perdin) dan melakukan plafonisasi jatah BBM untuk kendaraan dinas.

"Semuanya naik, naiknya juga cukup signifikan, jadi kami nanti melakukan evaluasi anggaran untuk perjalanan ataupun bahan bakar," ujar Wawan saat ditemui di kantornya, kemarin (10/6).

Adapun di Pemkot Jogja untuk perdin dalam negeri sudah dikurangi hingga 50 persen. Satu perdin luar negeri dikurangi hingga 70 persen. Sementara untuk kebijakan



plafonisasi BBM diterapkan dengan memberi jatah BBM hanya lima liter per hari untuk mobil dan satu liter per hari bagi sepeda motor.

Namun, jika melihat kondisi kenaikan harga Pertamina seperti sekarang, Wawan tidak menampik ada potensi perubahan kebijakan

dari kepala daerah. Misalnya untuk opsi jangka pendeknya dengan menurunkan kembali plafonisasi jatah BBM atau meminta ASN untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas.

Sementara untuk opsi jangka panjangnya, politisi berlatar belakang pengusaha itu menyatakan Pemkot sudah mulai melirik transisi ke kendaraan listrik. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya operasional dan mendukung kebijakan ramah lingkungan.

Wawan pun berharap agar para ASN di Pemkot Jogja juga bisa ikut bersikap bijak di tengah gejolak ekonomi seperti sekarang. Upaya yang dapat dilakukan dengan mulai menggunakan kendaraan nonemisi atau menggunakan transportasi publik untuk mengurangi penggunaan BBM.

"Kalau kami berharap ASN itu bisa menggunakan kendaraan publik atau pada posisi kendaraan yang tidak berbahan bakar fosil," harapnya. (mu/wia/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005